

DAFTAR RUJUKAN

Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor 6/PB/2005. Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Jakarta : Direktoral Jendral Perbendaharaan. NN.2009.

Arikunto. (2005). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Sagung Seto.

Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar, Edisi Ketiga : Erlangga.

Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Sektor Publik : Jakarta : Salemba Empat.

Bambang Pamungkas, 2012. “Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintah”. Jurnal Ilmiah Ranggagading Vol.12, No.2.

Meinarsih & Simanjutak P.D.L, 2014. Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintah Di Indonesia”. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol.1, No. 1.

Muindro Renyowijoyo 2013, *Akuntansi Sektor Publik, Organisasi Non Laba Edisi 3*, Jakarta.

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2006 (Pasal 1.9).

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung Alfabeta.

Mulyadi, 2008. Sistem Akuntansi, Jakarta : Salemba Empat.

- Dr. Sudaryono. 2015. Pengantar Bisnis Terori dan Contoh Kasus. Yogyakarta. Percetakan Andi.
- Beybby C. Horman Harijanto Sabijono, Dhullo Afandi, 2018. Analisis Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Kas Di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 2009. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Topan, R. (2019, Juli 15). Ruang Lingkup Keuangan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dipetik 05 Mei 2022, dari pengelolaan keuangan daerah: <https://rendratopan.com/2019/07/15/ruang-lingkup-keuangan-daerahmenurut-peraturan-pemerintah-nomor-12-tahun-2019-tentang-pengelolaankeuangan-daerah>.
- Arikunto. (2005). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Sagung Seto.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. (2003). Jakarta.
- Yusup, M. (2017). Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship Vol. 10, No. 2, Oktober 2016, 149-160 , 153.
- Mulyadi, 2008. Sistem Akuntansi, Jakarta: Salemba Empat.
- Tanjung, Abdul Hafiz, 2009. Penatausahaan Dan Akuntansi Keuangan Derah Untuk SKPD, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Tanjung, Abdul Hafiz, 2009. Pengertian Akuntansi Pemerintahan Untuk Daerah Edisi 3, Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, 2012. Jakarta. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER 66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. 2005. Jakarta. Direktur Jendral Perbendaharaan.

Prayudi, Aristia. 2018. Akuntansi Pemerintahan. 2018. Buku Ajar.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2019, *Pengertian Dana*. (<https://kbbi.web.id/dana>.) (Diakses Pada Tanggal 15 April 2022).

Pahlevi, (2019). *Pengertian Prosedur*. Dikutip Pada Tanggal 16 April 2022 Dari Pengertian Prosedur: <https://www.pahlevi.net/pengertian-prosedur/>

Kementerian Keuangan. 2013. *Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana*. <https://www.kemenkeu.go.id/page/penerbitan-surat-perintah-pencairan-dana/> (Diakses Pada Tanggal 16 April 2022).

Direktorat Jendral Perbendaharaan, 2019. *Pencairan Dana*. Kementerian Keuangan. <https://djpb.kemenkue.go.id/portal/id/layanan/kppn/pencairan-danq-html> (Diakses Pada Tanggal 17 April 2022).

Mulyadi, 2016, Sistem-Sistem Pada Akuntansi. Edisi Empat. Salemba Empat. Jakarta.